



---

**Rekonstruksi Konsep Keadilan Distributif dalam Membangun  
Kesejahteraan Sosial Perspektif Ekonomi Islam**

Maulana Ira\*

Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang, Indonesia

Email: maulanaira@staiait.ac.id

\*Corresponding Author

---

**Article History**

Received: December 25, 2026	Accepted: January 18, 2026	Published: January 30, 2026
DOI: 10.58518/al-faruq.v5i1.4627		

**Abstract:** Injustice and inequality in the distribution of income and wealth, both in developed and developing countries that embrace capitalism in their economic systems, create poverty. This study aims to analyze the dynamics of distribution within a capitalist economic system, the nature of distribution within Islamic economics, and Islamic solutions for the government to create prosperity and distributive justice. The method used is a qualitative approach using literature studies from scientific journals, books, and other sources related to Islamic economics. The results of the study indicate that the dynamics of distribution within a capitalist economic system are determined by market mechanisms (prices), private ownership (capital), and free competition. Distributive justice in Islamic economics focuses on the fact that existing economic theories are unable to address the problems of poverty and income and wealth inequality. In achieving distributive justice, Islamic economics requires the government to play a role in upholding values and morals, maintaining the technical operation of market mechanisms, and taking responsibility for market failures.

**Keywords:** Welfare; Distributive Justice; Reconstruction

**Abstrak:** Ketidakadilan dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, baik di negara maju maupun di negara berkembang yang menganut kapitalisme dalam sistem ekonomi negaranya, menciptakan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dinamika distribusi dalam sistem ekonomi kapitalis, hakikat distribusi dalam ekonomi Islam, serta solusi Islam kepada Pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan distribusi. Metode melalui pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi literatur dari jurnal ilmiah, buku, dan sumber-sumber lainnya terkait ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika distribusi dalam sistem ekonomi kapitalis ditentukan oleh mekanisme pasar (harga), kepemilikan pribadi (modal), dan persaingan bebas. Keadilan distributif dalam ekonomi Islam berfokus pada fakta bahwa teori-teori ekonomi yang sudah ada tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Dalam mencapai keadilan distribusi, ekonomi Islam mewajibkan pemerintah untuk berperan menjaga nilai dan moral, menjaga teknis operasional mekanisme pasar serta bertanggungjawab jika terjadi kegagalan pasar.

**Kata kunci:** Kesejahteraan; Keadilan Distributif; Rekonstruksi

## Pendahuluan

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Keadilan



merupakan nilai inti dalam ekonomi syariah, yang menekankan pada keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam menjalankan kegiatan ekonomi.<sup>1</sup> Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, di samping produksi dan konsumsi. Ajaran Islam menuntun kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. Dalam pandangan Islam, pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat jurang kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin semakin melebar. Sebagai salah satu aktivitas perekonomian, distribusi menjadi bidang kajian terpenting dalam perekonomian. Distribusi menjadi posisi penting dari teori mikro dan makro Islam sebab pembahasan dalam bidang distribusi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini.<sup>2</sup>

Pembahasan mengenai distribusi pendapatan, tidak terlepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut dan juga model instrumen yang diterapkan individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya.<sup>3</sup> Dalam sistem ekonomi konvensional, salah satu indikator pertumbuhan dan meratanya distribusi pendapatan adalah Pertambahan Produk Domestik Bruto (PDB) bagi suatu negara atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bagi suatu wilayah daerah. Dengan indikator tersebut maka pertumbuhan ekonomi akan memperbesar tingkat pendapatan masyarakat seingga setiap orang akan memperoleh lebih banyak kesempatan kerja dan pertambahan kekayaan dan kesejahteraan.<sup>4</sup> Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi merupakan nilai utama dalam sistem kapitalis karena akan berpengaruh pada pertambahan nilai ekonomi suatu bangsa atau masyarakat dengan mengenyampingkan aspek-aspek lain seperti aspek sosial, budaya dan spiritual.

Dari sinilah pertumbuhan ekonomi yang seharusnya memberi makna sosial, budaya dan agama namun sebaliknya akan memperlebar jurang antara yang kaya dan

<sup>1</sup> Kemala Dewi and Khairunnas Jamal, "Konsep Keadilan Dalam Ekonomi Syariah," *Al-Muzdahir* 7, no. 2 (2025): 193–200, <https://doi.org/10.55352/ekis.v7i2.1561>.

<sup>2</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 216.

<sup>3</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 119.

<sup>4</sup> Hidayatun Azizah, "Kritik Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme," *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2019): 115–30, <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>.

yang miskin, dan menggerogoti nilai-nilai dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Semakin terpusatnya kekuasaan yang semakin hebat di tangan korporasi global dan lembaga-lembaga keuangan telah melucuti pemerintah dan kemampuannya untuk menempatkan prioritas ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan dalam kerangka kepentingan umum yang lebih luas termasuk berkurangnya penghargaan terhadap kerja produktif yang dilakukan untuk diri sendiri, meskipun bermanfaat bagi kesejahteraan.<sup>5</sup>

Teori, model dan sistem ekonomi kapitalis yang dijadikan alat oleh negara-negara maju untuk memperkaya negaranya sendiri dengan cara mengeksplorasi kekayaan alam negara-negara berkembang dan terbelakang melalui investasi dan bunga pinjaman. Bahkan, program pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional, ternyata bukan dimaksudkan untuk menolong negara dunia ketiga, tetapi lebih pada upaya pemiskinan dan menjebak dalam lingkarannya setan kemiskinan yang mengakibatkan keterpurukan negara-negara berkembang.<sup>6</sup> Saat ini, realitas yang nampak dalam masyarakat adalah telah terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan, baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang yang mempergunakan sistem kapitalis sebagai sistem ekonomi negaranya, sehingga menciptakan kemiskinan di mana-mana.<sup>7</sup>

Berangkat dari dasar pemikiran dan realitas tersebut di atas, Islam sebagai agama yang *rahmah lil 'alamin*, mencakup ajaran-ajaran yang komprehensif dan universal diharapkan mampu memberikan alternatif pemecahan terhadap problem ekonomi umat. Dasar karakteristik pendistribusian dalam Islam adalah adil dan jujur, karena dalam Islam sekecil apapun perbuatan yang dilakukan, semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Pelaksanaan distribusi bertujuan untuk saling memberi manfaat dan menguntungkan satu sama lain. Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme muamalah antara produsen dan konsumen agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Apabila

---

<sup>5</sup> David C. Korten, *The Post Corporate World: Life After Capitalism*, ed. A. Rahman Zainuddin (Jakarta: Yayasan Obor, 1999), 95–96.

<sup>6</sup> Euis Amalia, "Potensi Dan Persoalan LKMS/BMT Bagi Penguatan UKM Dalam Kerangka Keadilan Distributif Ekonomi Islam: Studi LKMS/BMT Di 6 Kota Pulau Jawa," International Seminar and Symposium on Implementations of Islamic Economics to Positive Economics in the World (Surabaya, 2008).

<sup>7</sup> Sofyan Kabul Sidiq, *Distribusi Dalam Ekonomi Islam: Sebuah Kritik Terhadap Ekonomi Kapitalis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 2.

terjadi ketidakseimbangan distribusi kekayaan, maka hal ini akan memicu timbulnya konflik individu maupun sosial.<sup>8</sup>

Kajian ini memfokuskan pembahasan pada dinamika distribusi dalam sistem ekonomi kapitalis, hakikat distribusi dalam ekonomi Islam, serta diakhiri dengan pembahasan solusi Islam kepada Pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan distribusi.

Penelitian ini merupakan kajian *library research* (studi kepustakaan) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengutamakan kualitas dengan menggunakan beragam teknik untuk menemukan makna, definisi, konsep, ciri, gejala, simbol dan deskripsi suatu situasi. Penelitian ini berfokus pada data yang dipelajari untuk memberikan gambaran fenomena secara komprehensif. Dalam metode setidaknya penelitian ini melibatkan empat hal yaitu heuristik (pencarian sumber), kritik (penilaian keaslian sumber), interpretasi (penguraian dan penyatuan fakta), dan historiografi (penulisan kronologis dan sistematis). Sumber data primer diambil dari berbagai referensi yaitu buku, jurnal ilmiah, prosedur dan lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis mencakup segala aspek yang terkait dengan topik penelitian.

### **Dinamika Distribusi dalam Sistem Ekonomi Kapitalis**

Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja serta dapat memberikan kontribusi kearah kehidupan manusia yang baik.<sup>9</sup>

Tujuan dari distribusi, atas dasar dapat kita lihat beberapa tujuan ekonomi Islam, yaitu:

---

<sup>8</sup> Siti Amelia, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, "Pengaruh Implementasi Etika Bisnis, Konsep Produksi Dan Distribusi Pada UMKM Terhadap Profitabilitas Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 1, no. 4 (2022): 305–13, <https://doi.org//10.53625/juremi.v1i4.729>.

<sup>9</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), 10.

1. Islam menjamin kehidupan tiap pribadi rakyat serta menjamin masyarakat agar tetap sebagai sebuah komunitas yang memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Islam menjamin kemaslahatan pribadi dan melayani urusan jamaah, serta menjaga eksistensi negara dengan kekuatan yang cukup sehingga mampu memikul tanggung jawab perekonomian negara.
3. Mendistribusikan harta orang kaya yang menjadi hak fakir miskin, serta mengawasi pemanfaatan hak milik umum maupun negara.<sup>10</sup>

Kapitalisme tumbuh dan berkembang dari Inggris pada abad ke-18, kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara sebagai akibat dari perlawanan terhadap ajaran gereja, yang pada akhirnya aliran ini merambah ke segala bidang, termasuk ekonomi. Dasar filosofis pemikiran ekonomi pasar (kapitalis) bersumber dari karya monumental Adam Smith<sup>11</sup> yang sarat dengan pemikiran-pemikiran tingkah laku ekonomi masyarakat. Dari dasar filosofi tersebut kemudian menjadi sistem ekonomi dan pada akhirnya mengakar menjadi ideologi yang mencerminkan suatu gaya hidup.<sup>12</sup>

Fenomena ekonomi mengenai penyimpangan distribusi barang yang terjadi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi dan kebijakan ekonomi yang diterapkan di Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia saat ini masih didominasi oleh sistem ekonomi pasar (kapitalis), meskipun dalam perkembangannya muncullah wacana pemikiran tentang Konsep Ekonomi Pasar Terkelola (KEPT).<sup>13</sup>

Sistem distribusi ekonomi di Indonesia masih mengandung beberapa kelemahan. Hal ini disebabkan dominasi sistem ekonomi kapitalis yang cenderung memiliki kelemahan, diantaranya ketidakmerataan dan ketimpangan sosial, timbul ketidakselarasan, kemaksimalan profit, bersifat materialistik, adanya krisis moral dan mengesampingkan kesejahteraan.<sup>14</sup> Kecenderungan ekonomi pasar sebagaimana menyebabkan keadilan sebagai tujuan ekonomi Islami tidak mungkin dapat dicapai.

Berkaitan dengan masalah distribusi, sistem ekonomi kapitalis menggunakan asas bahwa penyelesaian kemiskinan dalam suatu negara dengan cara meningkatkan

<sup>10</sup> Musthafa Syukur, "Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam," *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2018): 33–51, <https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.559>.

<sup>11</sup> Adam Smith, *An Inquiry into The Nature and Causes of the Wealth of Nations* (London, 1776).

<sup>12</sup> Sidiq, *Distribusi Dalam Ekonomi Islam: Sebuah Kritik Terhadap Ekonomi Kapitalis*, 1.

<sup>13</sup> Prathama Rahardja and Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar* (Jakarta: LPFEUI, 2005), 407.

<sup>14</sup> Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, 84–86.

produksi dalam negeri dan memberikan kebebasan bagi penduduk untuk mengambil hasil produksi sebanyak yang mereka produksi untuk negara. Dengan terpecahannya kemiskinan dalam negeri, maka terpecah pula masalah kemiskinan individu sebab perhatian mereka pada produksi yang dapat memecah masalah kemiskinan mereka. Maka solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat adalah meningkatkan produksi.<sup>15</sup>

Dengan demikian, ekonomi hanya difokuskan pada penyediaan alat untuk memuaskan kebutuhan masyarakat secara makro dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional, sebab dengan banyaknya pendapatan nasional, maka seketika itu terjadilah pendistribusian pendapatan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu dibiarkan bebas memperoleh kakayaan sejumlah yang dia mampu sesuai dengan faktor-faktor produksi yang dimilikinya.

Asas distribusi yang diterapkan oleh sistem ekonomi kapitalis ini pada akhirnya berdampak pada realita bahwa yang menjadi penguasa sebenarnya adalah para pemilik modal dan konglomerat. Oleh karena itu, hal yang wajar, jika kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu berpihak kepada para pemilik modal atau konglomerat dan selalu mengorbankan kepentingan rakyat, sehingga terjadilah ketimpangan atau ketidakadilan dalam hal distribusi pendapatan dan kekayaan.

Secara umum, kritik mendasar terhadap pasar bebas dalam kapitalisme adalah pada konsep kebebasan pasar yang terlampaui bebas. Kebebasan ini telah melahirkan apa yang disebut sebagai “darwinisme sosial” dalam aspek alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi. Pasar telah menciptakan sebuah sistem seleksi kehidupan yang hanya berpihak pada golongan masyarakat yang berdaya beli, sehingga tidak ada tempat bagi masyarakat miskin. Pasar akan menutup mata terhadap kemiskinan dan pengangguran, sambil menawarkan rasionalitas baru yang tidak mempersulit dirinya terhadap moralitas atau pertimbangan pemerataan. Akhirnya, masyarakat miskin akan terpinggirkan dan semakin miskin.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Anita Rahmawati, “Membangun Sistem Distribusi Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Addin* 2, no. 2 (2010): 1–16.

<sup>16</sup> Amelia, Fasa, and Suharto, “Pengaruh Implementasi Etika Bisnis, Konsep Produksi Dan Distribusi Pada UMKM Terhadap Profitabilitas Dalam Perspektif Ekonomi Islam.”

Kemiskinan dianggap sebagai konsekuensi logis dan alamiah karena harus diterima dari sebuah persaingan. Bahkan kemiskinan tidak hanya dianggap sebagai konsekuensi logis kekalahan dalam persaingan ekonomi, tetapi juga divonis karena sikap malas dan bodoh semata dari orang miskin sehingga tidak bisa bersaing. Usaha produktif dan kerja keras masyarakat miskin tidak diberi penghargaan yang selayaknya, karena tidak didukung oleh kapital yang memadai. Kemiskinan terjadi karena adanya *vicious circle* (lingkaran setan) yang seolah benar-benar tidak bisa diinterupsi atau diputus sehingga harus diterima apa adanya. Pada akhirnya, kemiskinan dianggap bukan masalah ekonomi tetapi merupakan masalah sosial dan agama yang diselesaikan dengan banyak sedekah.<sup>17</sup>

Pandangan sistem ekonomi kapitalis yang menyatakan, bahwa kemiskinan dapat diselesaikan dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional adalah konsep yang tidak dapat dibenarkan, dan bahkan kemiskinan menjadi salah satu produk dari sistem ekonomi kapitalistik yang melahirkan pola distribusi kekayaan secara tidak adil. Fakta empirik menunjukkan bahwa bukan karena tidak ada makanan yang membuat rakyat menderita kelaparan melainkan buruknya distribusi makanan.

Ketidakadilan tersebut juga tergambar dalam pemanfaatan kemajuan teknik yang dicapai oleh ilmu pengetahuan hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang relatif kaya, yang pendapatannya melebihi batas pendapatan untuk hidup sehari-hari, sedangkan mereka yang hidup sekedar cukup untuk makan sehari-hari terpaksa harus tetap menderita kemiskinan abadi.<sup>18</sup> Kritik konstruktif di atas menghantarkan kita kepada pemikiran untuk membangun sistem distribusi perspektif ekonomi Islam yang diharapkan akan mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, baik di dunia dan akhirat.

## **Hakikat Distribusi dalam Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian integral dari agama Islam. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah*

<sup>17</sup> Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 317.

<sup>18</sup> Rahmawati, "Membangun Sistem Distribusi Perspektif Ekonomi Islam."

berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan demikian, sangat jelas bahwa ekonomi Islam terkait dan memiliki hubungan yang erat dengan agama, yang membedakannya dari sistem ekonomi kapitalis. Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara pandang dalam menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip dan nilai-nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Berbeda dengan ekonomi Islam, ekonomi konvensional lebih menekankan pada analisis terhadap masalah ekonomi dan alternatif solusinya. Dalam pandangan ini, tujuan ekonomi dan nilai-nilai dianggap sebagai hal yang sudah tetap atau di luar bidang ilmu ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional tidak hanya dalam aspek cara penyelesaian masalah, namun juga dalam aspek cara pandang dalam manganalisis terhadap masalah ekonomi.<sup>19</sup>

Ilmu ekonomi Islam berkembang secara bertahap sebagai suatu bidang ilmu interdisipliner yang menjadi bahan kajian para ahli fikih, mufasir, sosiolog dan politikus, diantaranya Abu Yusuf, Abu Ubaid, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan lainnya. Konsep ekonomi para cendikiawan muslim tersebut berakar pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga ia sebagai hasil interpretasi dari berbagai ajaran Islam yang bersifat abadi dan universal, mengandung sejumlah perintah serta mendorong umatnya untuk mempergunakan kekuatan akal pikirannya.

Islam memandang bahwa pemahaman materi adalah segalanya bagi kehidupan adalah merupakan pemahaman yang keliru, sebab manusia selain memiliki dimensi material juga memiliki dimensi non material (spiritual). Dalam ekonomi Islam, kedua dimensi tersebut (material dan spiritual) termasuk didalamnya, sebagaimana tercermin dari nilai dasar (*value based*) yang terangkum dalam empat aksioma yaitu tauhid (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*).<sup>20</sup>

Pertama, penekanan Islam terhadap tauhid (*unity*) merupakan dimensi vertikal

---

<sup>19</sup> Taufiq Ramadhan et al., "Keadilan Distributif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Sengketa Harta Bersama," *Al-Hairy: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025): 11–23, <https://doi.org/10.64344/hry.v1i1.12>.

<sup>20</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

yang menunjukkan bahwa petunjuk (hidayah) yang benar berasal dari Allah SWT. Hal ini dapat menjadi pendorong bagi integrasi sosial, karena semua manusia dipandang sama dihadapan Allah SWT. Manusia juga merdeka karena tidak seorangpun berhak memperbudak sesamanya. Kepercayaan ini diyakini seluruh umat Islam, sehingga dapat mendorong manusia dengan sukarela melakukan tindakan sosial yang bermanfaat.<sup>21</sup>

Kedua, dimensi horizontal Islam yaitu keseimbangan (*equilibrium*) yang menuntut terwujudnya keseimbangan masyarakat, yaitu adanya kesejajaran atau kesimbangan yang merangkum sebagian besar ajaran etik Islam, diantaranya adalah pemerataan kekayaan dan pendapatan, keharusan membantu orang yang miskin dan membutuhkan, keharusan membuat penyesuaian dalam spektrum hubungan distribusi, produksi dan konsumsi, dan sebagainya. Prinsip ini menghendaki jalan lurus dengan menciptakan tatanan sosial yang menghindari perilaku ekstrimitas.

Ketiga, kebebasan (*free will*) yaitu kebebasan yang dibingkai dengan tauhid, artinya manusia bebas tidak sebebas-bebasnya tetapi terikat dengan batasan-batasan yang diberikan Allah. Kebebasan manusia untuk menentukan sikap baik dan jahat bersumber dari posisi manusia sebagai wakil (*khalifah*) Allah di bumi dan posisinya sebagai makhluk yang dianugerahi kehendak bebas. Namun demikian agar dapat terarah dan bermanfaat untuk tujuan sosial dalam kebebasan yang dianugerahkan Allah tersebut, ditanamkan melalui aksioma keempat yaitu tanggung jawab (*responsibility*) sebagai komitmen mutlak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sesama manusia.

Berkenaan dengan teori distribusi dalam sistem ekonomi kapitalis dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut adil dan merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya dirasakan segelintir orang saja. Teori yang diterapkan sistem ekonomi kapitalis ini termasuk zalim dalam pandangan ekonomi Islam sebab teori ini berimplikasi pada penumpukan harta kekayaan pada sebagian kecil pihak saja.

---

<sup>21</sup> Munawwarah Sahib, Muh. Fitrah Anugrah, and Nurfaidah Syam, "Implementasi Etika Ekonomi Islam Dalam Kegiatan Produksi, Distribusi Dan Konsumsi," *El-Fata* 01, no. 01 (2022): 16-27, <https://doi.org/10.61169/el-fata.v1i1.2>.

Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam, yang sangat melindungi kepentingan setiap warganya, baik yang kaya maupun yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan.<sup>22</sup> Kebebasan di sini adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan, tidak seperti pemahaman kaum kapitalis, yang menyatakan sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Sedangkan keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam QS. al-Hasyr ayat 7<sup>23</sup> agar harta kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Dalam Al-Qur'an disebutkan keadilan adalah tujuan universal yang ingin dicapai dalam keseimbangan yang sempurna. Pengertian lain disampaikan oleh al-Farabi dalam Jusmaliani<sup>24</sup> yang menyatakan bahwa keadilan adalah sama dengan keseimbangan. Dalam tafsir Al-Qur'an, perintah adil adalah perintah yang paling dianjurkan dan harus diterapkan dalam keseluruhan aspek kehidupan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. ar-Rahman ayat 7-9<sup>25</sup> yang menekankan tentang keadilan di bidang ekonomi.

Kemudian di dalam sebuah hadis, juga dijelaskan tentang keseimbangan distribusi atau larangan menimbun harta yakni:

Dari Ibnu Syihab bin Aslam, saat itu Khalid bin Aslam pergi bersama Abdullah bin Umar. Kemudian ada seseorang Arab bertanya pada Abdullah bin Umar, seperti ini "tolong jelaskan ayat *walladza ila akhir*", lalu Abdullah bin Umar menjawab

<sup>22</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 201.

<sup>23</sup> Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya, Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019).

<sup>24</sup> Jusmaliani and Muhammad Soekarni, *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 98.

<sup>25</sup> Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan). agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Tegakkankah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu, Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

"barang siapa yang memiliki emas atau perak dan itu ditimbun serta tidak di zakatkan, maka nerakah yang pantas baginya", jika ada hal semacam itu tetapi belum di zakatkan, maka zakatkanlah karena zakat mampu membersihkan harta tersebut (HR. Bukhari).<sup>26</sup>

Sebagaimana keterangan dari hadis di atas, bahwa penimbunan harta sangat dilarang dan bagi penimbun harta akan mendapatkan balasan di neraka yang pantas baginya. Oleh karena itu, bagi umat muslim yang mempunyai kelebihan harta wajib menunaikan zakat (*zakat māl*), karena menimbun harta bertentangan dengan kepentingan umum, dan merusak tatanan dalam masyarakat. Seperti yang termasuk dalam prinsip distribusi dalam ekonomi Islam. Dengan demikian, sistem distribusi dalam pandangan ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, di antaranya adalah kebebasan individu, adanya jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan distribusi kekayaan yang adil.

### **Solusi Islam kepada Pemerintah untuk Menciptakan Kesejahteraan Sosial dan Keadilan Distribusi**

Upaya untuk merealisasikan kesejahteraan dan keadilan distribusi tidak dapat bertumpu pada mekanisme pasar saja. Karena mekanisme pasar yang mendasarkan pada sistem harga atas dasar hukum permintaan dan penawaran tidak dapat menyelesaikan dengan baik penyediaan barang publik, eksternalitas, keadilan pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan. Dalam realitas, pasar juga tidak dapat beroperasi secara optimal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pasar yang kompetitif, seperti informasi asimetri, hambatan perdagangan, monopoli, penyimpangan distribusi, dan lain-lain. Untuk itu, diperlukan adanya peran pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan.<sup>27</sup>

Pemerintah berperan secara aktif dalam sistem distribusi ekonomi di dalam mekanisme pasar Islami yang bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi pemerintah mengambil peran yang besar dan penting. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai wasit atas permainan pasar saja, tetapi ia akan berperan aktif

<sup>26</sup> Abī Zakariyā Yahyā Ibn Syaraf An-Nawawī, *Riyāḍ as-Ṣāliḥīn* (Beirut: Dār Ibn Katsīr, 2007), 136.

<sup>27</sup> Aditama Dewantara, "Etika Distribusi Ekonomi Islam: Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis Dengan Sistem Distribusi Islam," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2020): 20–36, <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.652>.

bersama-sama pelaku-pelaku pasar yang lain. Pemerintah akan bertindak sebagai perencana, pengawas, produsen sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar.

Peran pemerintah juga diperlukan terutama jika pasar tidak mampu menciptakan distribusi secara adil dan ada faktor penghambat untuk terciptanya mekanisme pasar yang efisien. Pemerintah memiliki otoritas untuk menghilangkan hambatan tersebut karena ketidakmampuan atau kurang sadarnya masyarakat. Seperti halnya masalah penimbunan yang marak dilakukan pengusaha, monopoli dan oligopoli pengusaha besar pada komoditas tertentu, asimetris informasi, terputusnya jalur distribusi dengan menghalangi barang yang akan masuk ke pasar, maupun cara-cara lain yang dapat menghambat mekanisme pasar.<sup>28</sup>

Oleh sebab itu, pemerintah dituntut selain untuk melakukan intervensi guna menjamin terciptanya kondisi yang mendukung mekanisme pasar berjalan dengan adil juga mendorong lahirnya moralitas yang dihiasi oleh sikap kejujuran, keterbukaan dan keadilan untuk menghasilkan persaingan dalam kebaikan sehingga pada akhirnya melahirkan mekanisme distribusi yang adil bagi masyarakat luas, bukan mekanisme suap dan kepentingan tertentu yang dekat dengan pemerintah.

Pemerintah bertugas menegakkan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap individu dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan, sehingga tugas pemerintah mengubah teori menjadi kenyataan, mengubah norma menjadi undang-undang, dan memindahkan keindahan etika menjadi tindakan sehari-hari. Di samping itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin terciptanya distribusi yang adil serta menjadi fasilitator pembangunan manusia dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus menjamin tidak terciptanya sistem yang dapat menyalimi pengusaha.<sup>29</sup>

Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad muamalah, seperti membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan individu dan pengembangan harta melalui

---

<sup>28</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia," *Islamica* 6, no. 2 (2012): 316–28, <https://doi.org/10.15642/islamica.2012.6.2.316-328>.

<sup>29</sup> Noor.

investasi, larangan menimbun harta, mengatasi peredaran dan pemuatan kekayaan di segelintir golongan, larangan kegiatan monopoli, dan berbagai penipuan dan larangan judi, riba, korupsi dan pemberian suap.

Pemerintah berperan dalam mekanisme ekonomi, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu *pertama*, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam; *kedua*, peran yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar; dan *ketiga*, peran yang berkaitan dengan kegagalan pasar. Ketiga peran ini diharapkan akan mampu mengatasi berbagai persoalan ekonomi karena posisi pemerintah tidak hanya sekedar sebagai perangkat ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi religius dan sosial.

Sedangkan mekanisme non-ekonomi adalah mekanisme yang tidak melalui aktivitas ekonomi produktif melainkan melalui aktivitas non-produktif, seperti hibah, sedekah, zakat dan waris. Mekanisme non-ekonomi dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi, yaitu untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna, jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata.<sup>30</sup>

Mekanisme non-ekonomi diperlukan, baik disebabkan adanya faktor penyebab yang alamiah maupun non-alamiah. Faktor penyebab alamiah, seperti keadaan alam yang tandus atau terjadinya musibah bencana alam. Semua ini akan dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan terhambatnya distribusi kekayaan kepada orang-orang yang memiliki keadaan tersebut. Dengan mekanisme ekonomi biasanya, distribusi kekayaan tidak dapat berjalan karena orang-orang yang memiliki hambatan yang bersifat alamiah tadi tidak dapat mengikuti kompetisi kegiatan ekonomi secara normal, sebagaimana orang lain. Jika hal ini dibiarkan saja, orang-orang yang tertimpa musibah (kecelakaan, bencana alam dan sebagainya) makin terpinggirkan secara ekonomi dan rentan terhadap perubahan ekonomi, yang selanjutnya dapat memicu munculnya problem sosial, seperti kriminalitas (pencurian, perampokan), tindakan asusila (pelacuran) dan sebagainya.

Mekanisme non-ekonomi juga diperlukan karena adanya faktor penyebab non-alamiah, seperti adanya penyimpangan mekanisme ekonomi. Penyimpangan mekanisme

---

<sup>30</sup> Fajar Dwi Nur Afifah, Adelia Mutiara Yaswindra, and Ayu Miranda, "Implementasi Etika Distribusi Dalam Islam Pada Pengelolaan Zakat Dan Infaq Di Baznas Trenggalek," *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 3, no. 1 (2024): 24–39.

ekonomi, seperti monopoli, penyimpangan distribusi, penimbunan, dan sebagainya dapat menimbulkan ketimpangan distribusi kekayaan. Untuk itu, diperlukan peran pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi ini. Bentuk-bentuk pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi ini antara lain adalah:

1. Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan.
2. Pemberian harta zakat kepada para mustahik.
3. Pemberian infak, sedekah, wakaf, hibah dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan.
4. Pembagian harta waris kepada ahli waris, dan lain-lain.

Pada prinsipnya distribusi mewujudkan beberapa hal berikut: 1) pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk, 2) memberikan efek positif bagi pemberi itu sendiri seperti halnya zakat di samping dapat membersihkan diri dan harta, juga meningkatkan keimanan dan menumbuhkan kebiasaan untuk berbagi, 3) menciptakan kebaikan di antara semua orang, 4) mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan, 5) pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya dan aset, 6) memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian. Diperkuat dengan ukuran prioritas bagi masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan dan kefakiran, karena golongan ini rentan terhadap kekufuran yang secara eksplisit dapat dilihat dari urutan dalam delapan mustahik zakat.

## **Kesimpulan**

Problematika ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan saat ini, tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi yang masih didominasi oleh sistem ekonomi kapitalis. Sistem ini, ternyata tidak mampu mewujudkan ekonomi global yang berkeadilan dan berkeadaban, bahkan menciptakan kemiskinan permanen bagi masyarakat sebab sistem ini berimplikasi pada penumpukan harta kekayaan pada segelintir pihak saja.

Sebagai respon atas ketidakadilan dan ketimpangan distribusi tersebut, maka Islam menawarkan sistem ditribusi ekonomi yang mengedepankan nilai kebebasan dalam bertindak dengan dilandasi oleh ajaran agama serta nilai keadilan dalam kepemilikan yang disandarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. Sistem distribusi ini menawarkan mekanisme dalam distribusi ekonomi Islam, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi, dengan melibatkan adanya peran pemerintah

dalam aktivitas ekonomi produktif dan non-produktif, sehingga dapat mewujudkan keadilan distributif. Dengan adanya pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi melalui aktivitas pemberian zakat, infak, hibah, wakaf dan sedekah, maka diharapkan akan dapat menjembatani kesenjangan distribusi pendapatan antara yang kaya dengan yang miskin.

## **Daftar Pustaka**

- Afifah, Fajar Dwi Nur, Adelia Mutiara Yaswindra, and Ayu Miranda. "Implementasi Etika Distribusi Dalam Islam Pada Pengelolaan Zakat Dan Infaq Di Baznas Trenggalek." *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 3, no. 1 (2024): 24–39.
- Amalia, Euis. "Potensi Dan Persoalan LKMS/BMT Bagi Penguanan UKM Dalam Kerangka Keadilan Distributif Ekonomi Islam: Studi LKMS/BMT Di 6 Kota Pulau Jawa." International Seminar and Symposium on Implementations of Islamic Economics to Positive Economics in the World. Surabaya, 2008.
- Amelia, Siti, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto. "Pengaruh Implementasi Etika Bisnis, Konsep Produksi Dan Distribusi Pada UMKM Terhadap Profitabilitas Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 1, no. 4 (2022): 305–13. <https://doi.org/10.53625/juremi.v1i4.729>.
- An-Nawawī, Abī Zakariyā Yahyā Ibn Syaraf. *Riyāḍ As-Ṣāliḥīn*. Beirut: Dār Ibn Katsīr, 2007.
- Anto, Hendrie. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Azizah, Hidayatun. "Kritik Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme." *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2019): 115–30. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>.
- Dewantara, Aditama. "Etika Distribusi Ekonomi Islam: Perbandingan Sistem Distribusi Kapitalis Dengan Sistem Distribusi Islam." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2020): 20–36. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.652>.
- Dewi, Kemala, and Khairunnas Jamal. "Konsep Keadilan Dalam Ekonomi Syariah." *Al-Muzdahir* 7, no. 2 (2025): 193–200. <https://doi.org/10.55352/ekis.v7i2.1561>.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Jusmaliani, and Muhammad Soekarni. *Kebijakan Ekonomi Dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019.
- Korten, David C. *The Post Corporate World: Life After Capitalism*. Edited by A. Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor, 1999.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia." *Islamica* 6, no. 2 (2012): 316–28. <https://doi.org/10.15642/islamica.2012.6.2.316-328>.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahardja, Prathama, and Mandala Manurung. *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*. Jakarta: LPFEUI, 2005.

- Rahmawati, Anita. "Membangun Sistem Distribusi Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Addin* 2, no. 2 (2010): 1–16.
- Ramadhan, Taufiq, Habib Ismail, Husnul Khotimah, Muhammad Ridho Maulana, and Ramzi Durin. "Keadilan Distributif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Sengketa Harta Bersama." *Al-Hairy: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025): 11–23. <https://doi.org/10.64344/hry.v1i1.12>.
- Sahib, Munawwarah, Muh. Fitrah Anugrah, and Nurfaidah Syam. "Implementasi Etika Ekonomi Islam Dalam Kegiatan Produksi, Distribusi Dan Konsumsi." *El-Fata* 01, no. 01 (2022): 16–27. <https://doi.org/10.61169/el-fata.v1i1.2>.
- Sidiq, Sofyan Kabul. *Distribusi Dalam Ekonomi Islam: Sebuah Kritik Terhadap Ekonomi Kapitalis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Smith, Adam. *An Inquiry into The Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London, 1776.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Syukur, Musthafa. "Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam." *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2018): 33–51. <https://doi.org/10.33650/profit.v2i2.559>.